



Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : I MADE WINDRA WICAKSANA

NIM : 1510611029



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER II-11 YOĞYAKARTA**

I MADE WINDRA WICAKSANA

1510611029

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 3 Januari 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH)

Kaprogdi

(Khoirul Rizal Lutfi, SH., MH)

Pembimbing

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : I Made Windra Wicaksana
NPM : 1510611029
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Mulyadi, S.H., M.H
Anggota 1

Dwi-Desi Yayi Tarina, S.H., M.H
Dekan

Dr. Aliftra, S.H., M.H
Ketua

Prof. Bambang Waluyo, S.H., M.H
Anggota 2

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : I Made Windra Wicaksana
NPM : 1510611029
Tanggal : 24 Januari 2019
TandaTangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Made Windra Wicaksana

NPM : 1510611029

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 IlmuHukum

JenisKarya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

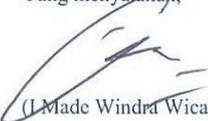
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Januari 2019

Yang menyatakan,


(I Made Windra Wicaksana)

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

I Made Windra Wicaksana

Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat jarang diketahui oleh masyarakat, sehingga dilakukanlah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan meneliti apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris normatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku, maupun dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Simpulan pada penelitian ini, penegakan hukum dalam proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku desersi dapat digambarkan secara global bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat ditegakan dan diketahui dalam penegakan hukum dalam proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer yang secara umum digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh anggota militer dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan penuntutan, kemudian persidangan dan terakhir adalah tahap eksekusi. Sedangkan hambatan atau kendala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum untuk memutus secara *in absentia* dipengaruhi oleh faktor personal, faktor dalam peraturan, faktor procedural penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan.

Kata Kunci : Desersi, *In Absentia*, Putusan Pengadilan Militer.

LAW ENFORCEMENT OF DESERTION CRIMINAL ACTS BY INDONESIAN NATIONAL ARMY MEMBER IN MILITARY LAW COURT AREA II - 11 YOGYAKARTA

I Made Windra Wicaksana

Abstract

Crimes committed by the Indonesian National Army Forces (TNI) are very rarely known by the public, so this study aims was conducted to determine the settlement process of criminal acts of desertion committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and examine what are the obstacles in their implementation, then try to find solutions to these obstacles. This research was carried out by the method of normative empirical legal research. In this study also used a qualitative approach with primary legal material interviewing and secondary legal material in the form of legislation, books, and other official documents, as well as tertiary legal material in the form of a large Indonesian dictionary, encyclopedia and others. The conclusions in this study, law enforcement in the process and mechanism of settlement of crimes in Military Court II-11 Yogyakarta against deserters can be described globally that in accordance with Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts can be upheld and known in law enforcement in the process and the mechanism for the settlement of criminal acts in military courts which are generally used as guidelines for resolving desertion cases committed by members of the military starting from the stage of investigation, continuing prosecution, then trial and finally the execution stage. While the obstacles or constraints of Military Court II-11 Yogyakarta in revealing legal facts to decide in absentia are influenced by personal factors, factors in regulations, procedural factors of investigation, examination, and execution in court.

Keywords : Desertion, In Abtentia, Military Court Decision.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis atas kehadiran Tuhan YME (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan, sehingga dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari masukan, dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada :

1. Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA.s, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas kesempatan dan segala kebijakannya.
2. Dwi DesiYayiTarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Dr. Suherman, S.H., L.L.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Subur, S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Drs. Subakdi, M.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Dr. Erni Agustina, S.H., Sp. N, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Prof. Dr. BambangWaluyo, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas bimbingan dan arahan mengenai penulisan Skripsi.
9. Heru Suyanto, S.H., M.H., CLA, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingannya dalam bidang akademik maupun non akademik.

10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas bimbingan dan arahannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
11. I Nyoman Yadnya dan Karmila Sugiyanti, selaku Orang Tua yang penulis cintai dan hormati, atas segala doa, dukungan, dan curahan kasih sayangnya.
12. Ni Wayan Ratna Satyastuti dan Ni Komang Luna Drupadi Windrastuti, selaku Saudara penulis , atas segala bantuan dalam bentuk informasi maupun dukungan yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Mayor Chk Handoko, S.H., selaku Kepala Sekretariat Pengadilan Militer atas bantuan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Estiningsih, S.H., M.H. selaku Kepala Oditurat Militer II-10 atas bantuan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Letda Chk (K) Sri Sumartini, S.H., selaku Perwira Urusan Sekretariat Oditurat MiliterII-10 atas bantuan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Paw-paw, Item, Monik atas segala pengertian disetiap keadaan, hiburan, dan dukungan dalam mengerjakan selama ini.
17. Cika Agia Wulandari, atas waktu, dukungan, dan segala bentuk bantuan yang tiada henti agar penulis bisa menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun.
18. I Komang Ari Wibowo, atas waktu, dukungan dan segala bentuk bantuan sehingga bagi penulis mendapatkan kelancaran di dalam pembuatan skripsi ini.
19. Muhammad Handoko, Bima Kurnia Mirzansyah, Effendi Bayu Aji, Muhammad Rifki, Denzelaldo, Chrisandi Siregar, Bambang Gultom, Michael J.R. Purba, Abednego Pasaribu, Nadhif Rizky Fajar, Muhammad Ardiansyah, dan Endrio Dinovansyah, selaku orang-orang terdekat yang

penulis sayangi, atas dukungan dan bantuannya selama penulis menjalani Pendidikan di Universitas Pembangunan “Nasional” Veteran Jakarta.

20. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2015 atas segala bantuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan Skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam Penulisan Skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 21 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
I.3. Ruang Lingkup Penulisan.....	6
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	7
I.6. Metode Penelitian.....	14
I.7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA.....	20
II.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	20
II.2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	22
II.3. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	28
II.4. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Pokok Militer.....	30
II.5. Tinjauan Umum Tentang Tahapan Dalam Penyelesaian Perkara.....	31
II.6. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi.....	35

II.7. Tinjauan Umum Tentang <i>In Absentia</i>	51
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA DESERSI MILITER YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.....	64
III.1. Tindak Pidana Sesuai Pasal 87 KUHPM.....	64
III.2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi.....	65
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA.....	68
IV.1. Ruang Lingkup Yang Dapat Dikualifikasikan Dalam Tindak Pidana Desersi.....	68
IV.2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta.....	73
BAB V PENUTUP.....	85
V.1. Kesimpulan.....	85
V.2. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI	
REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI	
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI	
LAMPIRAN	